

BAB IV
IMPLEMENTASI KEAMANAN EKONOMI DALAM
PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
DI MASA PANDEMI

Pada bab ini peneliti akan menganalisa pencapaian keamanan ekonomi Indonesia dalam program Sustainable Development Goals (SDGs) di masa pandemi.

4.1. Keamanan Ekonomi Indonesia

Ekonomi merupakan salah satu sektor yang terpenting dalam kehidupan manusia. Terlebih lagi, pasca berakhirnya perang dingin, dalam hal ini negara-negara berfokus di dunia ini tidak lagi terhadap peningkatan kekuatan militer untuk menghadapi ancaman dari negara lain melainkan lebih pada peningkatan perekonomian suatu negara yang dimana persaingan global mulai beralih dari militer ke perekonomian. Keamanan ekonomi menjadi salah satu hal terpenting, seperti yang disampaikan oleh pengamat ekonomi Sheila R. Ronis dalam pengantar buku *Economic Security. "Neglected Dimension of National Security"* disini menyebutkan bahwa keamanan ekonomi merupakan salah satu pokok utama dalam keamanan nasional.¹ Ketika saat berbicara mengenai keamanan nasional, kita juga tidak bisa melepaskan diri dari namanya kemampuan ekonomi suatu negara. Tidak ada pernyataan lagi bahwa salah satu bagian dari pembangunan suatu negara adalah perekonomian yang kuat dan maksimal untuk kesejahteraan rakyatnya.

¹ Mesjasz, Czeslaw, 2008, 'Economic Security,' dalam Hans Günter Brauch (eds.), *Globalization and Environmental Challenges*, Berlin : Springer Berlin Heidelberg, hlm. 569-580.

Dimasa modern ini semua negara berubahnya fokus dari peningkatan kekuatan militer menjadi peningkatan kekuatan ekonomi, disisi lain juga memperlihatkan pentingnya dimensi ekonomi dalam konsep keamanan manusia. Terlebih lagi saat ini, ekonomi menjadi alat untuk mempengaruhi negara lain dan kebijakan mereka saat ini, konflik di dunia internasional tidak lagi tentang ideologi dan pengambilalihan kekuasaan suatu negara, melainkan berubah menjadi pertarungan untuk mendapatkan hasil sumber daya, penguasaan terhadap daerah-daerah yang kaya dengan kandungan mineral, dan benda-benda yang berharga lainnya dan pada akhirnya akan dibawa ke pasar internasional.

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi Indonesia tepat ada di tengah-tengah pertarungan geo politik global tersebut.² Karenanya naiknya Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara dan berbagai program-program berlandaskan Trisakti yang dibuat oleh Presiden Jokowi, lewat program nawacita, revolusi mental, dan poros maritim dunia adalah tepat waktu dan sesuai dengan perkembangan global. Karenanya semua program-program Jokowi tersebut haruslah dijalankan oleh orang-orang yang berideologi Trisakti. Yang terjadi sekarang adalah kebalikannya. Demikian pula tuntutan untuk mengawal program-program nawacita ini agar tetap di jalurnya dan konsisten sangatlah besar.

Sejalan dengan politik luar negeri Jokowi dalam menetapkan kebijakan ekonomi politiknya, setidaknya ada dua hal yang menarik. Kedua hal tersebut adalah poros maritim dan diplomasi ekonomi. Poros maritim berusaha untuk mengembalikan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan, untuk memajukan

² Schonhardt, Sara (21 May 2013). "The Meteoric Rise Of Joko Widodo". The Global Journal. Diakses 15 March 2014.

perekonomiannya.³ Oleh karena itu, dalam hal tersebut pembangunan infrastruktur kelautan, khususnya pelabuhan ini dianggap esensial agar Indonesia dapat kembali akan kejayaan, seperti pada masa kerajaan Majapahit. Di lain sisi, diplomasi ekonomi berusaha untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki secara potensial. Diplomasi ekonomi dapat ditujukan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia yang hingga saat ini masih belum menjangkau Indonesia Timur. Hal ini sangat perlu diperhitungkan, mengingat ongkos logistik Indonesia cukup mahal hal ini sulit untuk bersaing dengan negara lainnya di Asia Tenggara. Diharapkan melalui diplomasi ekonomi, masyarakat Indonesia dapat mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia diatas 8% seperti yang dicita-citakan.

4.1.1. Program SDGs di Masa Pandemi Untuk Mencapai Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh sebab itu, SDGs menjadi salah satu program acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.⁴ Implementasi agenda 2030 untuk tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) baru saja memasuki tahun kelima ketika

³ Mansbaach, Richard W. dalam Nuraeni Suparman dkk, Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010

⁴ Samantha Walrafen. "When Will This End? Your Biggest Questions About COVID-19 Answered," Forbes, 2 April 2020

pandemi covid-19 menasuki negara di dunia. Pada tahun 2020, setiap negara tidak memiliki pilihan selain menjadikan penanganan dampak penyebaran Covid-19 sebagai agenda prioritas utama. Dalam hal ini setiap negara menjadi sangat *state centric* dan mendayagunakan semua sumber-sumber keuangan dan kapasitas teknis operasional untuk menyelamatkan rakyatnya yang terinfeksi Covid-19 dan menguburkan yang tidak terselamatkan, dengan itu pemerintah juga sambil menanhan laju penyebaran yang terinfeksi dengan berbagai kebijakan nasional seperti *lockdown*, karantina wilayah, *massive rapid test*, dan pembatasan sosial. Ironisnya, covid-19 adalah bencana global, tetapi penanganannya sangat *state centric*.

Namun, implementasi agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia mengalami tantangan besar pada awal tahun 2020. Karena disebabkan oleh adanya virus pandemi tak hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga berdampak terhadap pencapaian SDGs. Data SDGs di tahun 2020 menunjukkan bahwa meskipun agenda pencapaian SDGs dimasa pandemi masih *on the track*, namun upaya pencapaian SDGs di Indonesia segera dicapai.⁵ Indonesia kini masih berada di peringkat 101 dengan skor 45,3. Masih jauh tertinggal dengan negara Asia Tenggara seperti Thailand peringkat 71 dengan skor 60,54,

⁵ Antaranews.com."Pandemi Covid-19 Jadi Tantangan Dalam Pencapaian SDGs". <https://www.antaranews.com/berita/1521264/pandemi-covid-19-jadi-tantangan-dalam-pencapaian-sdgs>. (diakses 28 Mei 2020)

Malaysia peringkat 60 dengan skor 71,76, dan Filipina di peringkat 65 dengan skor 65,5.

Selain itu, menurut Kementerian Bappenas RI, menyatakan dalam situasi pandemi ini menyebabkan penyesuaian strategi dan upaya pencapaian target SDGs. Sehingga Kementerian ini akhirnya terpaksa menyesuaikan dengan membuat konsep baru untuk mengubah rencana SDGs di Indonesia, Ada beberapa target dari SDGs yang perlu di perhitungkan akibat pandemi antara lain.

- a. Pertama, Tanpa Kemiskinan, situasi pandemi ini menurunkan pendapatan kelompok rentan dan miskin serta meningkatkan resiko bagi kelompok menengah untuk turun menjadi kelompok miskin.
- b. Kedua, Tanpa Kelaparan, akibat PSBB distribusi logistik pangan terganggu akibat PSBB, serta akses terhadap pangan menurun akibat PHK.
- c. Ketiga, Kehidupan sehat dan sejahtera. Dari sektor kesehatan sangat perlu pembenahan mulai dari segi akses pelayanan, dan alat-alat Kesehatan.
- d. Keempat, Pendidikan yang berkualitas, di masa pandemi ini juga mengalami perubahan sangat signifikan. Dari pada itu, kesiapan parah guru-guru untuk mengajar secara daring, infrastruktur TIK perlu dioptimalkan, dan perluasan teknologi internet bagi keluarga miskin dan rentan.

e. Kelima, dalam hal ini juga akan berdampak pada berkurangnya kesenjangan, dalam penurunan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada ketenagakerjaan. Menurut Kementerian PPN/Bapennas RI.⁶ Jika problem ini tidak diintervensi, tingkat kemiskinan pada 2020 hingga 2021 mendatang bisa mencapai 10,54 persen. Namun, jika hitung garis kemiskinan dapat ditekan menjadi 9,24 persen.

Meskipun begitu, dampak virus pandemi ternyata tidak hanya menimbulkan efek negatif saja dalam pencapaian program SDGs. Tetapi juga menimbulkan dampak yang positif dikarenakan berkurang pemburuan hewan dilindungi sekaligus menciptakan pelestarian lingkungan.

Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan Indonesia harus bisa melihat situasi dan kondisi dalam hal nya banyak sekali kendala atau tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan atau dikenal sebagai SDGs dalam hal ini pemerintah membuat kebijakan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang dimana SDM ini salah satu sumber penghasilan pendapatan negara untuk meningkatkan kembali perekonomian Indonesia pasca pandemi.

⁶ Bappenas.go.id."SDGs Solusi Bersama Pulihkan Indonesia Pasca Pandemi".
<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/sdgs-solusi-bersama-pulihkan-indonesia-pascapandemi-covid-19>. (diakses 15 Mei 2020)

4.1.2. Pekerjaan layak Dan Pertumbuhan Ekonomi di Masa Pandemi

Dengan disituasi pandemi saat ini membuat ekonomi global semakin memprihatinkan, yang juga akan berimbas pada sektor perekonomian Indonesia. Hal ini memaksa Presiden Jokowi harus menentukan kebijakan yang jelas dan tepat sasaran. Pemberlakuan sebuah kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) saat ini telah mengubah gaya hidup masyarakat. Tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, aktivitas yang dibatasi juga mempengaruhi sektor perdagangan bisnis yang berefek pada perekonomian.

Dalam hal ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan suatu pekerjaan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah juga membutuhkan pemodal dan kawasan dalam mendukung perekonomian. Pada dasarnya dilihat perkotaan merupakan kawasan yang banyak kegiatan komersial dan industri.⁷ Keberadaan pemodal ini jelas bisa untuk melakukan investasi dengan pertimbangan kawasan, oleh sebab itu akan menumbuhkan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Adanya penghambatan terjadi pada birokrasi yang sangat rumit dan kepemilikan data yang tidak jelas menjadi penghambat bagi pemodal untuk melakukan investasi. Maka dari itu pemanfaatan teknologi dan informasi geospasial diharapkan mampu bisa

⁷ Hönke, J., & Ledere, M. (2013). Development and International Relations. In W. Carlsnaes, T. Risse, & B. A. Simmons, Handbook of International Relations (hlm. 775-800). London: Sage Publication Ltd.

mendorong keinginan pemodal dalam melakukan investasi di Indonesia.

Melihat respon dalam situasi terhadap penurunan ekonomi pekerja informal, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tanggap dimasa pandemi yang secara khusus ditujukan kepada kelompok miskin yang rentan secara ekonomi.⁸ Sebuah aturan kebijakan sosial tersebut baru dicanangkan ketika kondisi ekonomi Indonesia bawah sudah mengalami keterpurukan, yaitu pada awal April 2020 melalui sebuah surat edaran dari kementerian desa PDT Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 melalui mekanisme distribusi bantuan yang menggunakan anggaran dana desa. Dampak sudah terlihat secara ekonomi yang dialami masyarakat Indonesia sebenarnya sudah mulai terjadi pada pertengahan bulan Maret 2020 ketika itu munculnya peraturan untuk *social distancing* dan *work from home* (WFH). Akibatnya keterlambatan respon dalam kebijakan pemerintah tersebut, para pekerja rentan semakin terdesak dalam kondisi perekonominya.

Dalam hal ini pemerintah menciptakan suatu pelatihan pekerjaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dimasa pandemi, mendefinisikan pelatihan atau training sebagai suatu kegiatan yang bermaksud untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap dalam bekerja, keterampilan dan juga

⁸ Sindonews.com."Balai Latihan Kerja Dalam Pembangunan Berkelanjutan".
<https://www.sindonews.com/topic/7261/balai-latihan-kerja-dalam-pembangunan-berkelanjutan>.
(diakses 31 Agustus 2020)

pengetahuan seseorang, yang nantinya sesuai dengan kebutuhan suatu perusahaan. Dengan demikian, pelatihan yang dimaksudkan seperti melatih pengembangan keterampilan semata-mata.

Di era pandemi ini banyaknya masyarakat mengeluhkan tentang pekerjaan untuk memperbaiki perekonomian.⁹ Hal ini pemerintah langsung membuat suatu program pelatihan yang dinamakan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) dibuatnya program ini agar masyarakat dapat pelatihan yang maksimal dimasa pandemi ini sekaligus untuk meningkatkan keahlian yang dimiliki masyarakat. Pemerintah membuat program pelatihan ini bukan tanpa alasan yaitu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) di point ke delapan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dalam pembangunan berkelanjutan, sangat penting bagi keefektifan berjalannya sebuah kegiatan dalam suatu organisasi. Keberhasilan dalam kinerja seseorang dilihat suatu bidang pekerjaan yang banyak ditentukan oleh tingkat kompetensinya, profesionalisme, dan juga komitmennya terhadap bidang pekerjaan yang ditekuninya itu. Salah satu cara dalam meningkatkan keterampilan, tingkat kompetensi, profesionalisme dan mengembangkan potensi yaitu melalui pelatihan atau kursus.

⁹ Liputan6.com. "Balai Latihan Kerja".
<https://www.liputan6.com/tag/balai-latihan-kerja>. (diakses 21 Januari 2021)

Balai besar pengembangan latihan kerja (BBPLK) merupakan unit pelaksanaan teknis pusat (UPTP) kementerian tenaga kerja RI bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.¹⁰ Melalui Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengembangan pelatihan, pemberdayaan, dan sertifikasi tenaga kerja dan tenaga pelatihan, masyarakat yang ingin meningkatkan keterampilannya untuk memasuki dunia kerja dapat mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kejuruan tersebut diantaranya adalah las, teknik otomotif, manufaktur, teknik listrik, teknik elektronika, teknik refrigerator, bisnis dan manajemen, teknik informatika, bangunan, garmen apparel, dan teknik fashion design.

Dengan di bukanya pelatihan ini di era pandemi membuat satu langkah program pemerintah berjalan dengan baik, untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan sumber daya manusia dalam poin kedelapan SDGs.¹¹ Hal ini untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan di masa pandemi akan berjalan dengan baik. Kualitas sumber daya manusia memang saat ini menjadi syarat mutlak untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas sumber daya alam merupakan investasi

¹⁰ Alex, S. Nitisemito. 1996. Manajemen Sumber Daya Manusia : Management Personalia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

¹¹ Said Zainal Abidin, "Pembangunan Sumber Daya Manusia PJP II", dalam Manajemen Pembangunan, No.10/III, 1995.

manusia jangka panjang, karena setiap manusia menempuh jalur pendidikan tidak secara otomatis menjadikan dirinya berkualitas.

4.1.3. Mentata kelola Pembangunan Berkelanjutan Ekonomi di Masa Pandemi

Dengan berbagai hal atau laporan dari lembaga studi terkait dampak Covid-19 menyatakan bahwa aktivitas ekonomi dunia tahun 2020 akan terganggu. Hal ini tentu sangat dikhawatirkan oleh pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan target pencapaian SDGs pada nomor delapan (8) yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.¹² Saat ini keadaan perekonomian global termasuk Indonesia sedang mengalami ketidak pastian dan mengarah pada resesi ekonomi bahkan diperkirakan akan kontraksi di tahun 2020 sehingga dampaknya lebih dalam di bandingkan krisis keuangan global tahun 2008-2009.¹³ Akibat adanya pandemi covid-19 ini seluruh pelaku ekonomi merasakan dampaknya, mulai dari rumah tangga, perusahaan/UMKM, lembaga keuangan, pemerintah, dan *rest of the world*.

Maka dari itu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan di sektor ekonomi pada masa pandemi. Seperti program pemulihan bagi dunia usaha

¹² Azhar, Muhamad. Azzahra, H.A. 2020. Government Strategy in Implementing the Good Governance during COVID-19 Pandemi in Indonesia. Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 2, June 2020

¹³ Dewi Wuryandani. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 dan Solusinya. Info Singkat Vol. XII, No. 15/I/Puslit/Agustus/2020

melalui koordinasi antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan dengan perbankan nasional. Program tersebut di bentuk untuk mempertahankan sektor bisnis, usaha, dan juga sektor riil. Dengan mengeluarkan Rp7,4 triliun ditujukan untuk padat karya kementerian/lembaga, dana insentif daerah (DID) pemulihan ekonomi sebesar Rp13,4miliar. Kemudian dalam merealisasikan program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM adalah sebesar Rp30,21 triliun dari pagu sebesar Rp123,4triliun, dan untuk insentif usaha sebesar Rp16,2 triliun dari pagu Rp120,61 triliun.

Selain itu, berbagai kebijakan dibidang ekonomi dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan pada masa pandemi juga dilakukan, mulai dari stimulus pajak dan permodalan bagi beberapa UMKM, restrukturisasi kredit, serta adanya diskon dan pembebasan biaya listrik rumah tangga.¹⁴ Disini pemerintah dituntut harus bisa mentata kelola yang baik dan menjaga persistensi pembangunan berkelanjutan di masa pandemi. Tata kelola yang baik menjaga dan menghubungkan beberapa komponen pembangunan yang berupa komponen sosial, lingkungan dan ekonomi agar dapat diamati secara terus menerus sehingga mampu mencapai tujuan keberlanjutannya.

Tata kelola yang baik pada pembangunan berkelanjutan juga dapat dilihat sebagai suatu kerja sama dan kolaborasi yang

¹⁴ Thobagus Mohammad Nu'man. (2020). Perilaku ProLingkungandi Masa Pandemi Covid 19.

menggabungkan pembangunan dalam lingkup lingkungan, manusia, serta ekonomi. Adanya tata kelola yang baik dapat membantu menjaga konsistensi pencapaian pembangunan berkelanjutan yang dapat diukur sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang tersedia. Tata kelola yang baik menyediakan ruang bagi seluruh pihak untuk saling memenuhi kebutuhan dan melaksanakan pengendalian untuk tetap melakukan pengawasan antara satu dengan yang lainnya.

4.2. Kebijakan Presiden Joko Widodo Dalam Meningkatkan Keamanan Ekonomi Indonesia Pada Masa Pandemi Untuk Mencapai SDGs.

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep penting dalam pelaksanaan SDGs, konsep pembangunan berkelanjutan sebagai dasar dari lahirnya agenda-agenda pembangunan ke depan seperti SDGs dan MDGs. Pembangunan Berkelanjutan juga merujuk pada pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka.¹⁵ Dengan demikian pembangunan ini mengandung dua unsur utama yakni konsep tentang kebutuhan, khususnya kebutuhan yang esensial seperti rumah, fasilitas infrastruktur dan energi bagi orang di dunia serta konsep tentang keterbasan, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa kini selain untuk kebutuhan di masa depan. Yang disebut berkelanjutan adalah lemahnya

¹⁵ Bappenas.go.id."Konsep SDGs kerangka Pembangunan Pasca Pandemi". <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/berita-harian-bappenas/konsep-sdgs-kerangka-pembangunan-pasca-pandemi-2020>. (diakses 7 November 2020)

memandang pertumbuhan ekonomi sebagai hal yang diinginkan namun menegaskan bahwa pertumbuhan harus di batasi untuk memastikan dampak ekologis tidak mengancam keberlanjutan jangka panjang. Oleh sebab itu pembangunan berkelanjutan menjadi sebuah pilar untuk melakukan pembangunan karena melihat dari beberapa aspek.

Pembangunan berkelanjutan memerlukan upaya kebijakan yang dimana nantinya kebijakan ini dapat mempengaruhi untuk perubahan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan demikian untuk mengatasi permasalahan global, diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan merata.¹⁶ Di emasa pandemi ini, kepemimpinan dan aksi kolektif dalam sektor bisnis sangat dibutuhkan untuk pemulihan dampak sosial yang sedang terjadi, mengingat sejumlah kelebihan yang bisa ditunjukkan seperti penciptaan lapangan kerja layak serta pengembangan teknologi, inovasi, dan investasi.

Presiden Joko Widodo menegaskan, pada awal pandemi masuk ke Indonesia semua perancangan pembangunan mulai dari perekonomian, sektor pariwisata, industri dan pembangunan berkelanjutan lainnya akan mengalami masalah atau kendala yang belum tau dipastikan kapan akan selesai, hal ini Presiden Joko Widodo juga membuat kebijakan untuk mengontrol masalah perekonomian Indoneisa salah satunya yaitu menciptakan program UMKM agar dalam sistem UMKM ini perekonomian Indonesia akan tetap stabil dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan atau SDGs pada nomor depalan.

¹⁶ Kompas.com. "SDGs Era New Normal Pentingnya Sinergi Swasta Dan Pemerintah Wujudkan". <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/10/16040091/sdgs-era-new-normal--pentingnya-sinergi-swasta-dan-pemerintah-wujudkan>. (diakses 10 Juli 2020)

Untuk mencapai SDGs dimasa pandemi Presiden Joko Widodo terus berpegang prinsip karena kebijakan yang dibuat ini bukan hanya untuk menghadapi masalah pandemi tapi jura era Indutri 4.0 kedepannya. Kebijakan ini meliputi sebuah sistem jangka pendek bagi UMKM yakni pengenalan teknologi digital dan pelatihan bagi para pelaku dan pekerja UMKM serta kebijakan jangka panjang bagi UMKM untuk bisa beradaptasi dengan penggunaan teknologi untuk proses produksi, penggunaan media teknologi digital untuk mempromosikan suatu produk UMKM, dan menemukan pasar potensial bagi produk yang dihasilkan.

Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam *sustainable development goals* (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan dimasa pandemi ini sangat penting, selain untuk menstabilkan perekonomian Indonesia juga adanya membuka lapangan pekerjaan, seperti 17 point dalam SDGs terdapat di nomor delapan (8), yang dimana pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.¹⁷ Hal ini sangat memungkinkan dimasa pandemi ini Presiden Joko Widodo membuat kebijakan yang sangat tepat dari pada itu pemerintah setiap daerah harus bisa meningkatkan UMKM ini agar pembangunan berkelanjutan ini bisa dicapai secara maksimal di tahun 2030 yang akan mendatang.

4.2.1. Peran Investasi Dalam Pertumbuhan Keamanan Ekonomi Regional di Masa Pandemi

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber

¹⁷ Kontan.co.id.” UMKM Memiliki Peran Strategis Kebangkitan Ekonomi Di Tengah Pandemi”. <https://nasional.kontan.co.id/news/umkm-memiliki-peran-strategis-menopang-kebangkitan-ekonomi-di-tengah-pandemi-covid-19>. (diakses 30 Juli 2020)

daya - sumber daya, mulai dari sumber daya alam atau sumber daya manusia dana akan nantinya akan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pembangunan ekonomi dalam wilayah tersebut.¹⁸ Kebijakan ini di ambil oleh Presiden Joko Widodo supaya untuk lebih mudah mencapai pembangunan berkelanjutan di masa pandemi.

Pembangunan ekonomi regional pada dasarnya dibentuk untuk meningkatkan perekonomian wilayah, untuk itu bisa memakmurkan masyarakat keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut. Permasalah pokok dalam pembangunan daerah itu biasanya terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi yang ada seperti sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah).¹⁹ Dalam pembangunan ekonomi regional dimasa pandemi ini tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah, dalam upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. dengan itu

¹⁸ Suwanan, A.F., dan Sulistiani, E.H., "Fiscal Decentralization and Regional Disparities in Indonesia: A Dynamic Panel Data Evidence, Journal of Indonesia Economy and Business, Volume 24, Number 3, September 2009.

¹⁹ Kontan.co.id."Jokowi Sampaikan Rancangan Kebijakan Ekonomi Indonesia Pada APBN". <https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-sampaikan-rancangan-kebijakan-ekonomi-indonesia-pada-apbn-2021>. (diakses 27 Juni 2021)

pemerintah daerah dan masyarakatnya harus bisa membangun bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa keamanan ekonomi regional tujuannya dibentuk pada masa pandemi yaitu salah satunya di wilayah tersebut agar bisa mengembangkan lapangan kerja layak bagi penduduk yang ada di wilayah tersebut. Tujuan sebuah rancangan dalam pembangunan ekonomi dan pengerjaan itu hanya lebih untuk memberikan sebuah kesempatan kerja bagi penduduk yang ada di wilayah setempat ketimbang mencari pekerja dari luar.²⁰ Dengan itu untuk mencapai sebuah stabilitas ekonomi daerah yang baik, pembangunan ekonomi akan sukses jika mampu memenuhi semua kebutuhan dunia usaha misalnya: lahan, sumber keuangan, infrastruktur, dan sebagainya yang beragam. Hal ini ditunjukkan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan fluktuasi ekonomi sektoral, yang pada akhirnya akan menimbulkan sebuah pengaruh kesempatan pada kerja masyarakat.

Dalam meningkatkan perekonomian regional masa pandemi dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar antara lain:

1. Strategi pembangunan fisik/lokalitas (*Locality or Physical Development Strategy*)

²⁰ Bisnis.com."Jokowi Teken Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Regional Wilayah".
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210120/9/1345194/jokowi-teken-inpres-percepatan-pembangunan-ekonomi-di-kawasan-regional-wilayah>. (diakses 20 Januari 2021)

2. Strategi pengembangan dunia usaha (*Business Development Strategy*)
3. Strategi pengembangan sumber daya manusia (*Human Resource Development Strategy*)
4. Strategi pengembangan masyarakat (*Community-based Development Strategy*)

Terdapat peranan penting dalam 4 kelompok diatas untuk kelancaran pembangunan pertumbuhan keamanan ekonomi regional di masa pandemi, untuk itu pemerintah daerah harus bisa melakukan strategi kelompok tersebut dengan baik agar rencana pembangunan berkelanjutan di Indonesia dapat dicapai pada masa pandemi.

Pada aspek kebijakan yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo ada tuntutan atau desakan yang diajukan kepada parah pejabat-pejabat pemerintah, hal ini untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Dalam hal ini Presiden Joko Widodo menekankan setiap pemimpin daerah harus berfokus untuk membangun perekonomian regional dimasa pandemi agar dapat dicapai dalam pembangunan berkelanjutan dimasa pandemi.

Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa untuk meningkatkan ekonomi regional dimasa pandemi perlu adanya investasi dari pemodal misalnya pihak swasta, pihak asing dan lain-

lainnya, untuk itu peran investasi ini nantinya akan memiliki peran sentral dalam pembangunan keamanan ekonomi regional, selain adanya modal sumber daya manusia yang memberikan efek terhadap pembangunan keamanan ekonomi.²¹ Di sisi lain peran investasi dimasa pandemi cenderung akan memberikan efek yang akumulatif dan juga menjadi jangka panjang. Investasi ini nantinya diharapkan mampu untuk menjadi salah satu sumber awal dalam pembangunan keamanan ekonomi pasca pandemi dan juga akan berdampak untuk pembangunan berkelanjutan di era pandemi.

Menurut Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di media sosial.²² Presiden Joko Widodo meminta layanan investasi tidak dihambat di tengah pandemi, pasalnya investasi menjadi faktor penting dalam pemulihan ekonomi. Dengan adanya investasi hal itu akan membantu pembangunan berkelanjutan di tengah pandemi. Presiden Joko Widodo juga meminta setiap seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah melakukan percepatan dalam investasi, bahkan investasi besar diminta dikawal langsung oleh kepala daerah tersebut.

Jadi peran investasi ini tidak hanya berkontribusi pada satu aspek saja yaitu pertumbuhan ekonomi tetapi mampu untuk

²¹ Katadata.co.id."Instruksi Jokowi Kepada Kepala Daerah Kejar Pembangunan Ekonomi". <https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/60a3b7c328a3e/instruksi-jokowi-ke-kepala-daerah-kejar-pembangunan>. (diakses 18 Mei 2021)

²² Kontan.co.id."Penting Tumbuhkan Ekonomi Saat Pandemi, Jokowi Minta Layanan Investasi Tak Dihambat". <https://nasional.kontan.co.id/news/penting-tumbuhkan-ekonomi-saat-pandemi-jokowi-minta-layanan-investasi-tak-dihambat>. (diakses 6 Januari 2021)

memberikan kontribusi terhadap aspek lain seperti kesejahteraan, membuka pekerjaan layak dan pengurangan kemiskinan, sesuai dengan point-point program SDGs yang akan dilakukan Indonesia dimasa pandemi.²³ Menurut Presiden Joko Widodo keberhasilan ekonomi individu serta keseluruhan ekonomi tergantung pada seberapa luas dan efektif orang berinvestasi dalam diri mereka sendiri serta adanya teknologi dapat menjadi pendorong ekonomi modern, terutama dari sektor teknologi tinggi.

Melihat situasi ini dimasa pandemi memang sangat dibutuhkan peran investasi untuk mempercepat pertumbuhan keamanan ekonomi regional di wilayah tersebut, hal tersebut akan berimplikasi pada adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang kemudian diikuti dengan adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi pada level makro dan mikro.²⁴ Dalam hal itu peran investasi memang saat ini sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi Indonesia dimasa pandemi, maka penting untuk menganalisa kondisi daerah yang terdampak pandemi, untuk meningkatkan kembali perekonomian daerah pasca pandemi hal itu dengan adanya peran investasi ini daerah tersebut akan kembali menormalkan pertumbuhan perekonomian daerah tersebut.

²³ Kompas.com."Kebijakan Jokowi Peran Investasi Dalam Pemulihan Ekonomi di Tengah Pandemi".

<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/22/10210341/kebijakan-jokowi-peran-investasi-dalam-pemulihan-ekonomi-di-tengah-pandemi?page=all>. (diakses 23 maret 2021)

²⁴ Mincer, J.(1996).Economic Development, Growth of Human Capital, and The Dynamics of The Wage Structure. *Journal of Economic Growth*,1 (1), 29–48.

Maka dari itu modal investasi memiliki kontribusi yang sangat bagus dapat menimbulkan nilai-nilai positif dan signifikan pada pertumbuhan keamanan ekonomi regional dimasa pandemi. Presiden Joko Widodo juga menegaskan dalam konferensinya, semakin daerah tersebut memiliki kesejahteraan, meningkatkan pendidikan dan pekerjaan layak semakin baik akan mendorong perekonomian menjadi lebih baik.²⁵ Hal ini dapat menjadikan suatu landasan bagi pemerintah untuk semakin meningkatkan program pembangunan berkelanjutan yang akan dicapai dimasa pandemi ini, faktor lain yang memiliki peranan dalam pertumbuhan keamanan ekonomi regional adalah desentralisasi fiskal. Secara empiris kontribusi investasi juga memberikan nilai positif sehingga ketika mampu untuk dikembangkan akan meningkatkan perekonomian dimasa pandemi secara keseluruhan.

4.2.2. Pengaruh Program SDGs Dalam Pencapaian Keamanan Ekonomi Indonesia

Tujuan pembangunan berkelanjutan atau biasa disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs) di masa pandemi memang banyak negara akan memperkirakan tidak akan dicapai dengan hasil yang maksimal dengan itu semua negara-negara menjadi state centric, akibatnya negara-negara di dunia dipaksa oleh keadaan

²⁵ Kompas.com".Jokowi Penciptaan Lapangan Kerja dan meningkatkan pendidikan di Masa Pandemi Terus Diupayakan". <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/25/15161591/jokowi-penciptaan-lapangan-kerja-dan-meningkatkan-pendidikan-di-masa-pandemi-terus-diupayakan>. (diakses 25 Mei 2021)

untuk mampu memenuhi kebutuhan internalnya dan mengurangi ketergantungan dari negara lain.²⁶ Termasuk Indonesia juga terdampak efek yang selalu ketergantungan dengan negara lain, hal ini membuat Presiden Joko Widodo mengambil sikap dalam upaya penanggulangan dampak pandemi yang terjadi pada Indonesia.²⁷

Dengan itu Presiden Joko Widodo membuat indikator-indikator untuk keamanan ekonomi Indonesia dimasa pandemi dengan dibuatnya kebijakan UMKM, peranan investasi salah satu indikator yang dibuat oleh presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia tidak boleh terlalu lama terdiam di masa pandemi ini karena banyak hal-hal yang ingin di selesaikan dengan waktu yang sudah ditetapkan, seperti agenda program sustainable development goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan yang akan di targetkan di tahun 2030 harus selesai, memang terlihat di masa pandemi ini adanya pengaruh program SDGs dalam pencapaian keamanan ekonomi indonesia sangat baik. Selain menargetkan pembangunan ekonomi di masa pandemi dan pekerja layak, Pemerintah daerah harus dapat meningkatkan perekonomian wilayah tersebut untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di masa pandemi.

²⁶Sindonew.com."Corono Dan Dinamika Politik Global".
<https://nasional.sindonews.com/berita/1577143/18/corona-dan-dinamika-politik-global>. (diakses 3 april 2020)

²⁷Wartaekonomi.co.id."Jokowi Yakin UMKM Dan Investasi Jadi Kunci Bangkitkan Ekonomi".
<https://www.wartaekonomi.co.id/read297336/sdgs-2030-jokowi-yakin-umkm-dan-investasi-jadi-kunci-bangkitan-ekonomi>. (diakses 30 Juli 2020)

Presiden Joko Widodo memang pernah menyatakan Indonesia mendapatkan tantangan yang berat untuk mencapai target sustainable development goals (SDGs) di masa pandemi.²⁸ Dengan itu Presiden Jokowi mendorong terobosan-terobosan atau kebijakan-kebijakan yang dimana terobosan ini dapat dipacu dalam pembangunan berkelanjutan, secara tidak langsung pengaruh program SDGs ini dimasa pandemi selain menjadi tantangan juga menjadi motivasi. Dengan adanya pengaruh program SDGs Indonesia semakin giat dalam mempercepat pertumbuhannya untuk itu Indonesia akan mencapai target dengan tepat waktu yang sudah ditentukan.

Pengaruh program SDGs dalam pencapaian keamanan ekonomi Indonesia di masa pandemi secara langsung dimaksudkan untuk mencapai hasil-hasil pembangunan yang menggambarkan adanya kemajuan walaupun di masa pandemi, kemajuan yang dimaksud dalam hal ini seperti studi kasus yang penulis analisa yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini tergambar dalam pilar SDGs pada nomor delapan. Secara umum target dan tujuan SDGs untuk pembangunan nasional dan juga pembangunan daerah yang merata yang ada di wilayah Indonesai. Untuk itu perlu adanya komitmen dari unsur pimpinan dan bersinergi, konsistensi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lebih

²⁸ Bisnis.com. "Jokowi Pandemi Covid-19 Memperburuk Pencapaian SDGs". <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201217/9/1332287/jokowi-pandemi-covid-19-memperburuk-pencapaian-sdgs>. (diakses 17 desember 2020)

keberpihakan pada kesejahteraan sosial, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), peran masyarakat sangat dibutuhkan, organisasi sosial dan dunia usaha secara aktif, sistem birokrasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang transparan, akuntabel dan efisien.

Nilai dalam mencapai target SDGs dalam pencapaian keamanan ekonomi Indonesia tidak hanya dikarenakan komitmen Indonesia kepada dunia internasional, namun paling utama nilai-nilai yang terkandung di dalam SDGs sejalan dengan berkomitmen dalam kebijakan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.²⁹ Peran pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan menjadi kunci dasar dan menengah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia di masa pandemi.

Oleh karena itu Presiden Joko Widodo menyatakan pengaruh program SDGs dalam pencapaian keamanan ekonomi Indonesia sangatlah bagus, menjadikan motivasi agar Indonesia di masa pandemi tetap menjalankan target pembangunan berkelanjutan dan adanya dorongan dari peran pemerintah dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Presiden Jokowi sudah sangat tepat untuk menormalkan perekonomian Indonesia.

²⁹ Kemlu.go.id."Indonesia Sampaikan Keberhasilan Pencapaian SDGs di Markas PBB". <https://kemlu.go.id/portal/id/read/466/berita/indonesia-sampaikan-keberhasilan-pencapaian-sdgs-di-markas-pbb>. (diakses 18 Juli 2019)

